

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

Bab ini pada dasarnya membahas mengenai landasan teori dan kebijakan strategi pengembangan pariwisata, namun tidak ditujukan untuk membahas masing-masing tema secara utuh, melainkan pokok-pokok pengertian yang dianggap penting saja, dan lebih difokuskan kepada hubungan strategi pengembangan pariwisata Gunung Galunggung.

2.1 Landasan Hukum

Suatu proses perencanaan khususnya di Indonesia memiliki landasan-landasan hukum yang berlaku sampai saat ini, adapun landasan perencanaan yang terkait diantaranya :

- Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Th 2014
- Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelnggaran Penaggulan Bencana
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang kelembagaan Kebencanaan
- Kepmendagri No. 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencegahan Penanggulan Bencana di Daerah
- Permendagri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulan Bencana.

2.2 Kebijakan

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu).

2.2.1 RTRW Provinsi Jawa Barat

Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, dijelaskan bahwa pariwisata merupakan pendorong pengembangan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antarwilayah.

Kedudukan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat dapat dilihat dari fungsi yang diembannya, yaitu sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa.

2.2.2 RTRW Kabupaten Tasikmalaya

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dikembangkan dengan mengoptimalkan daerah pariwisata, sehingga terciptanya daerah yang mendorong perekonomian terhadap wilayahnya. Tujuan dari pengembangan Pariwisata adalah ;

- Peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang berakar pada alam dan budaya.
- Peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata berdaya saing dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik daerah.

2.3 Kepariwisata

2.3.1 Teori Pengembangan Pariwisata

Perencanaan merupakan sebuah proses pengembangan dan pengkoordinasian secara menyeluruh dari apa yang sudah ada sekarang untuk menjadi lebih baik agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal perencanaan pembangunan kawasan pariwisata, proses pengembangan dan pengkoordinasian tersebut menyangkut masa depan dari suatu destinasi pariwisata. Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen : politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan (Paturusi, 2001).

Dalam proses sebuah perencanaan kawasan pariwisata, elemen-elemen yang disebut diatas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan agar mewujudkan pembangunan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan mencapai sasaran kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari sebuah pembangunan. Pada proses awal perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan *amenity core* merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan, terlebih dengan potensi alam dan kebudayaan yang menjadi daya tarik kawasan pariwisata yang secara signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung. Namun disisi lain, elemen lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari *stakeholder* dan juga sebagai pihak yang akan merasakan dampak langsung pengembangan kawasan tersebut baik dampak positif maupun negative yang akan ditimbulkan. Berikut beberapa teori perencanaan pengembangan kawasan pariwisata dari beberapa ahli:

1. Perencanaan Pariwisata oleh Inskeep & Gunn

Sebelum memulai pelaksanaan pengembangan wisata sebagai sebuah kawasan pariwisata baru, sangat penting diawal untuk semua stakeholder yang terkait memahami pengertian, maksud dan tujuan perencanaan pariwisata itu sendiri agar arah pengembangannya nanti dapat terkontrol dan sesuai dengan tujuan bersama yaitu *Pro Growth, Pro Poor* dan *Pro Job*. Dibawah ini adalah definisi perencanaan pariwisata oleh Inskeep & Gunn.

Inskeep mendefinisikan perencanaan sebagai “mengorganisasikan masa depan untuk meraih tujuan tertentu.” (hal. 26) Pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh dibutuhkan bukan saja karena keseluruhan aspek (dalam

perencanaan pariwisata) saling terkait, melainkan pula terhubung dengan lingkungan alamiah dan area sosial. Dengan segera, pemikiran Inskeep merubah kecenderungan para perencana pariwisata dalam memandang alam dan komunitas. Kedua hal itu kini dipandang sebagai subjek, bukan objek yang bisa dieksplorasi maupun dieksploitasi. Ide inilah yang kemudian diresapi oleh Inskeep dalam berbagai penjelasan selanjutnya terhadap cara serta proses bagaimana melakukan perencanaan pariwisata dalam lingkup nasional dan regional, serta dalam menganalisis perencanaan, memformulasikan kebijakan, mendesain pembangunan, mempertimbangkan dampak, maupun menstrategikan dan mengimplementasikan *tourism plan*.

Inskeep & Gunn (1994), mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu :

- 1) Mempertahankan kelestarian lingkungannya
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut
- 3) Menjamin kepuasan pengunjung
- 4) Meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya.

Sehingga melalui konsep perencanaan pariwisata yang dijelaskan oleh Gunn dan Inskeeps dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam melakukan sebuah perencanaan suatu objek wisata, diperlukan adanya fokus yang lebih menyeluruh pada aspek lain selain sumber daya (atraksi) yang ada daerah sehingga pembangunan dan pengembangan objek pariwisata di suatu daerah selain untuk menggerakkan roda ekonomi, diharapkan dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya melalui keterlibatan secara langsung dalam sebuah pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut (*Community Involvement*).

2. Konsep “Tourism Area Life Cycle of Evolution” oleh Butler

Seperti halnya diawal, setelah memahami latar belakang sebuah perencanaan kawasan pariwisata *stakeholder* termasuk pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk memahami konsep dari *Tourism Area Life Cycle of Evolution* dimana konsep ini sangat penting untuk mengantisipasi penurunan kualitas kawasan karena eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan. Berikut adalah penjelasannya;

Seperti yang dikatakan oleh Butler 1980 dalam, bahwa terdapat enam tingkatan atau tahapan dalam pembangunan pariwisata. Ke enam tahapan tersebut adalah :

A. Tahap Penemuan (*Exploration*)

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

B. Tahap Pelibatan (*Involvement*)

Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode, Masyarakat dan pemerintah lokal sudah mulai melakukan sosialisasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah lokal mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

C. Tahap Pengembangan (*Development*)

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internasional untuk menanamkan modal di kawasan wisata yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) *Multinational company* telah beroperasi dan cenderung menggantikan perusahaan lokal yang telah ada, artinya usaha kecil yang dikelola oleh penduduk lokal mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

D. Tahap Konsolidasi (*Consolidation*)

Pada tahap ini, sector pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan internasional semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisata atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah lokal mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta. Hubungan antara swasta (MNC dan Nasional) dan pemerintah daerah semakin meningkat baik hubungan *Government to Government (G2G)*, *Business to Business (B2B)*, dan *Business to government (B2G)*.

E. Tahap Stagnasi (*Stagnation*)

Pada tahapan ini, angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relative tinggi namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk *repeater guest* atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat intensif namun usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi. Pengelolaan destinasi melampui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negatif tentang destinasi seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga yang tidak sehat pada industry pariwisata, dan telah terjadi degradasi budaya masyarakat lokal.

F. Tahap Penurunan atau Peremajaan (*Decline/Rejuvenation*)

Setelah terjadi Stagnasi, ada dua kemungkinan bisa terjadi pada kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik. Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jika Ingin Melanjutkan

pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi atraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik. Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan.

3. Daya Dukung (*Carrying Capacity*) dan Kedudukannya Dalam Proses Perencanaan oleh MacLeod & Cooper

Untuk menghindari *decline* atau penurunan kualitas yang telah dijelaskan pada teori Butler diatas, teori daya dukung atau harus dipahami oleh pemegang kebijakan dan masyarakat Sukaratu untuk menghindari kerusakan yang terjadi karena eksploitasi yang berlebihan baik eksploitasi pada sumber daya alam dan ranah sosial budaya masyarakat Sukaratu sebagai tuan rumah.

Daya dukung mengacu pada kemampuan sebuah sistem untuk mendukung suatu aktivitas pada derajat (*level*) tertentu (MacLeod and Cooper, 2005). daya dukung lingkungan didefinisikan sebagai jumlah optimum individu suatu spesies yang dapat didukung kebutuhan hidupnya oleh satu kawasan tertentu pada periode perkembangan spesies secara maksimum. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dimaksudkan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dalam suatu ekosistem.

Konsep daya dukung menurut MacLeod and Cooper (2005) dikategorikan atas : daya dukung fisik, daya dukung ekologi, daya dukung sosial dan daya dukung ekonomi.

- Daya dukung fisik; Didasarkan pada batas spasial sebuah areal dengan memperhatikan berapa materi (unit) yang dapat ditampung dalam areal tersebut.
- Daya dukung ekologi: secara sederhana adalah berapa ukuran populasi pada suatu ekosistem agar ekosistem tersebut dapat berkelanjutan, batas kepadatan populasi yang melebihi daya dukung dapat menyebabkan laju tingkat kematian spesies menjadi lebih besar dibandingkan angka kelahiran. Pada prakteknya, hubungan antar spesies amatlah kompleks

dan angka kelahiran maupun kematian rata-rata dapat menyeimbangkan kepadatan populasi pada suatu tempat.

- Daya dukung sosial : intinya adalah ukuran yang dapat ditoleransi pada suatu tempat yang dikerumuni orang banyak.
- Daya dukung ekonomi: dapat digambarkan sebagai tingkat dimana suatu area dapat diubah sebelum aktivitas ekonomi terjadi sebelum mendapat pengaruh yang merugikan.

Sehingga, melalui konsep daya dukung yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung (*Carrying Capacity*) memegang peranan dan kedudukan yang vital dalam mengontrol arah pengembangan perencanaan suatu obyek pariwisata sehingga aktifitas pariwisata yang dibangun tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan menganalisis daya dukung yang tersedia di suatu obyek wisata untuk memenuhi permintaan/aktifitas kepariwisataan tersebut baik itu wisatawan (*demand*) ataupun sumber daya manusia dan alam (*supply*)

4. Keterkaitan 5 Pilar Pengembangan

Berikut dibawah ini merupakan salah satu inti keterkaitan 5 pilar pengembangan yang harus dicermati dalam membangun kawasan pariwisata. Proses perencanaan pengembangan kawasan pariwisata diawali dengan melakukan analisis faktor internal dan eksternal suatu kawasan. Faktor internal adalah sesuatu yang dapat diprediksi dan diatur sesuai tujuannya, hal yang berada didalamnya yaitu *Supply (Tourist Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary, Community Involvement)* Sedangkan factor eksternal adalah *Demand (Tingkat kunjungan wisatawan)* yang datang kesuatu kawasan pariwisata.

a. Hubungan *Demand* dengan *Tourist Attraction*

Tourist attraction adalah segala atraksi yang menarik untuk dilihat dan dikunjungi sehingga sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi *demand (tourist)* untuk berkunjung kesuatu destinasi pariwisata.

b. Hubungan *Demand* dengan *Accessibility*

Akses adalah suatu hal yang sangat penting dan vital dalam mempengaruhi kunjungan wisatawan (*demand*) ke suatu objek/destinasi pariwisata. Tidak dapat dipungkiri, dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata *demand* saling mempengaruhi dalam pembangunan akses

menuju objek wisata tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi *demand* atau *tourist*.

c. Hubungan Demand dengan Amenities

Amenities merupakan hal yang pentingnya dalam pengembangan kawasan pariwisata. *Amenities* dapat berbentuk fasilitas-fasilitas penunjang seperti hotel, transportasi, restaurant, spa, dan yang lainnya. Jika di suatu daerah tidak terdapat amenities yang mencukupi, maka *demand* tidak akan betah berkunjung di tempat tersebut. *Amenities* ini sangat dipengaruhi oleh permintaan dan harapan konsumen, Fasilitas-fasilitas inilah yang menyebabkan *demand* merasa betah dan nyaman berada di suatu destinasi pariwisata. Jika *amenities* tidak berkualitas dan mencukupi, maka *demand* tidak akan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada *demand* maka *amenities* tidak akan berkembang karena tidak ada pemasukan atau keuntungan. Namun sebaliknya, jika pembangunan *amenity core* tersebut dilakukan terlalu eksploratif maka pengembangan tersebut akan jauh dari konsep *sustainability* yang berbasis berkelanjutan dan pro kerakyatan.

d. Hubungan Demand dengan Ancillaries

Ancillaries adalah hal-hal pendukung sebuah pariwisata, seperti misalnya ketersediaan *tourist information centre* dan peraturan-peraturan mengenai objek wisata tersebut. Adanya hal-hal pendukung ini disebabkan oleh *demand* yang berkunjung ke suatu tempat karena hal-hal tersebut dibutuhkan oleh *demand* dan dirasa dapat menghasilkan keuntungan, kenyamanan dan keamanan dalam berkunjung.

e. Hubungan Demand dengan Community Involvement

Community involvement adalah keterlibatan atau dukungan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. *Community involvement* ini sangat mempengaruhi kunjungan *demand*. Masyarakat harus dapat mendukung jalannya kegiatan pariwisata ini. Jika masyarakat tidak mendukung atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti pencurian, perampokan, pengeboman, pembunuhan, maka *demand* tidak akan berani mengunjungi

daerah tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap baik dan ramah terhadap tamu, maka *tourist* akan betah tinggal di daerah tersebut. Sehingga peran keterlibatan masyarakat adalah sangat menentukan keberlanjutan sebuah kawasan wisatanya sendiri, terlebih dengan potensi kebudayaan yang mengundang minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung maka telah sepantasnya masyarakat dapat menikmati hasil pariwisata itu sendiri.

5. Perencanaan Kawasan Wisata yang Berkelanjutan Oleh Verseci dalam A.Yoeti

Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan mengelola sumber daya pariwisata (*Tourism Resources*) yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Sebelum suatu rencana akan dilakukan, untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan mutlak kiranya terlebih dahulu dilakukan pendekatan pada pemuka adat setempat (A.Yoeti, 2008:253), perlu dilakukan penjelasan dengan melakukan sosialisasi manfaat dan keuntungan proyek bagi penduduk setempat dan para stakeholder agar terwujudnya sebuah pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan *pro community*. Verseci dalam A.Yoeti (2008 : 253) perencanaan strategis pembangunan pariwisata berkelanjutan memberikan kerangka kerja sebagai berikut::

1. *Future Generation*, yaitu generasi yang akan datang yang perlu diperhatikan kecukupan sumber daya untuk memperoleh kehidupan yang berimbang
2. *Tourism Resources*, yaitu sumber daya pariwisata yang dikelola dengan memperhatikan keempat factor lainnya : future generation, equity, partnership, dan carrying capacity
3. *Equity*, yaitu sikap perencana dan pengelola yang dituntut selalu memperhatikan unsur keadilan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan di waktu yang akan datang.
4. *Carrying Capacity*, yaitu kemampuan suatu kawasan untuk menampung kunjungan wisatawan dan semua permasalahan yang terjadi sebagai akibat kunjungan wisatawan ini.
5. *Partnership*, yaitu kemitraan yang perlu diciptakan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang.

2.3.2 Komponen Pariwisata

Gunn (1988) dalam Virgiyanto mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang harus dilihat dari dua sisi yakni sisi permintaan (*demand side*) dan sisi pasokan (*supply side*). Kegiatan pariwisata pada dasarnya mencakup dua utama yaitu **sediaan (*supply*)** dan **permintaan (*demand*)**. Komponen sediaan (*supply*) merupakan produk wisata yang dapat ditawarkan, meliputi aktivitas wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, serta prasarana dan sarana lingkungan. Sementara komponen permintaan (*demand*) mencakup keinginan serta aspirasi wisatawan dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata.

2.3.3 Komponen Sediaan

1. Aktivitas Wisata

Aktivitas Wisata didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan wisata baik berupa atraksi atau events yang ditawarkan atau tersedia di suatu objek wisata, maupun berupa kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung.

Jenis aktivitas yang ada dapat ditentukan berdasarkan bentuk daya tarik dan potensi yang dimiliki oleh Objek Wisata tersebut (Inskeep, 1991). Salah satu dari beberapa aktivitas standar wisata yang berbasiskan air yang dikemukakan oleh Baud-bovy dan Lawson (1977), tidak hanya aktivitas berenang saja yang dapat diterapkan. Selain itu ada juga aktivitas-aktivitas lain (*Standards for Land-Based Outdoor Recreational Activities*) seperti di bawah ini:

- Piknik,
- Taman, lapangan olahraga, ruang terbuka, umum,
- Aktivitas jalan kecil seperti; gerak jalan, berjalan, bersepeda, dan menunggang kuda.
- Berbagai macam aktivitas yang berkenaan dengan rekreasi seperti ; olah raga ruang terbuka, climbing, dan sport centre,
- Kombinasi dengan beberapa kegiatan olahraga di ruangan tertutup.

2. Sarana Pariwisata

Sarana pariwisata yang memiliki hubungan cukup penting dengan studi ini meliputi :

a) **Pintu Masuk (*Gate*)**

Merupakan gerbang ke tapak bagi wisatawan yang datang pintu masuk dicirikan dengan tampilan fisik gerbang yang menandai masuknya wisatawan ke kawasan wisata.

b) Fasilitas Penerima Wisatawan

Fasilitas ini berfungsi untuk mengurus administrasi maupun informasi yang meliputi :

- Fasilitas pelayanan pengelolaan administrasi yang terdiri dari ruang receptionist, kantor administrasi, toilet dan ruang tunggu.
- Fasilitas pelayanan informasi yang terdiri dari kantor informasi wisata, toilet dan ruang tamu.

a. Fasilitas Kegiatan Umum

Fasilitas ini merupakan fasilitas penunjang bagi kegiatan wisata secara keseluruhan berupa fasilitas perdagangan dan jasa, kios-kios cinderamata, ruang terbuka, taman, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, sport centre, fasilitas hiburan (karaoke, panggung hiburan) dan Fasilitas Kantor Pengelola.

b. Fasilitas Akomodasi

Fasilitas ini berupa hotel, pondok, cottage, dan restoran/rumah makan.

c. Fasilitas Pelayanan Kegiatan Rekreasi di Pantai.

Fasilitas ini akan melayani wisatawan untuk kegiatan rekreasi di pantai yaitu berjalan kaki, berenang, bersepeda, berjemur, berlayar, jogging, menunggang kuda, menyelam, bermain jet ski, olah raga, dan *camping*. Fasilitas yang dibutuhkan adalah menara pengawas, terminal naik perahu, terminal jet ski, jalan kecil untuk berjogging, bersepeda, dan berjalan kaki, tempat berteduh, istal kuda dan toilet.

3. Jasa Pariwisata

Jasa pariwisata, sebagaimana jasa lainnya memiliki sifat khas, yaitu tidak biasa ditimbun dan akan dikonsumsi pada saat jasa tersebut dihasilkan (Yoeti, 1996 : 80). Dari sifat ini dapat pula dikatakan bahwa jasa pariwisata adalah pelayanan wisata yang diberikan kepada wisatawan. Analisis terhadap pelayanan wisata merupakan hal penting karena pengeluaran yang dihabiskan oleh wisatawan untuk membayar pelayanan memberikan input utama dalam analisis ekonomi kepariwisataan (Gunn, 1988 dalam Indriasari, 2002 : 22).

Jasa pariwisata meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990). Komponen pelayanan jasa wisata yang dikaji dalam studi ini meliputi :

- Pusat informasi; dalam pengelompokan komponen-komponen pariwisata, informasi dan promosi merupakan pelayanan yang sejalan.

Dengan adanya informasi, orang dapat memberikan penilaian yang berkaitan dengan pengalaman dari perjalanan wisata yang akan mereka lakukan, dan penilaian ini akan mempengaruhi keputusan pilihan tujuan wisata mereka (Gunn 1998 dalam Indriasari, 2002 : 23). Karenanya untuk menarik minat orang untuk berwisata ke suatu tempat, informasi yang diberikan harus memberikan nilai promosi yang menggambarkan daya tarik obyek wisata. Untuk memudahkan promosi, dapat digunakan jenis-jenis material promosi seperti brosur, *booklets*, *guide-book*, *folder*, *leaflets*, dsb (Yoeti, 1996 : 192-193). Material promosi ini juga biasa disediakan oleh biro perjalanan wisata untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya (Indriasari, 2002 : 23).

- Pemandu wisata; untuk bentuk-bentuk tertentu dalam sistem kepariwisataan mungkin memerlukan jenis-jenis fasilitas dan pelayanan wisata khusus (Indriasari, 2004 : 24). Berkaitan dengan wilayah studi yang memiliki daya tarik wisata berupa aktivitas jelajah cagar alam, diperlukan suatu jasa pemandu wisata yang berperan sebagai penunjuk jalan bagi pengunjung yang melakukan aktivitas penjelajahan tersebut.

4. Prasarana Lingkungan

Prasarana yang cukup merupakan suatu hal yang diperlukan bagi keberhasilan pengembangan pariwisata, dan pada umumnya juga menjadi faktor kritis di negara atau wilayah yang belum berkembang, yang seringkali memiliki keterbatasan infrastruktur (Heraty dalam Inskeep, 1991 : 199). Prasarana dasar yang melayani komunitas penduduk lokal di suatu area seringkali dapat pula melayani kegiatan pariwisata hanya dengan sedikit menambah jumlah pelayanan. Begitu pula sebaliknya, prasarana yang dibangun untuk kegiatan pariwisata dapat melayani kebutuhan penduduk lokal secara umum (Inskeep, 1991 : 120). Prasarana kegiatan pariwisata yang dibahas dalam studi ini mencakup jalan, air bersih, listrik, telepon, pengelolaan sampah dan drainase.

2.3.4 Komponen Permintaan

1. Wisatawan

Karena beragamnya definisi mengenai kepariwisataan, maka beragam pula definisi mengenai wisatawan. Beberapa ahli membatasi pengertian wisatawan sebagai seseorang yang melakukan perjalanan sejauh lebih 50 atau 100 mil (sekitar 80 atau 160 km) dari lokasi tempat tinggalnya. Sebagian definisi

lain menyatakan bahwa hanya mereka yang menginap di luar rumah yang dihitung sebagai wisatawan. Definisi yang lebih sederhana menganggap bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan dan atau tinggal di suatu tempat di luar wilayah tempat tinggalnya, baik negara, propinsi, kota, ataupun desa selama tidak lebih daripada satu tahun, dengan tujuan bisnis, mengisi waktu luang, ataupun tujuan lainnya. Istilah pengunjung memiliki pembedaan dalam pelaku perjalanan wisatanya (Inskeep, 1991 : 19), yaitu: (a) wisatawan, yaitu pengunjung sementara yang menetap sedikitnya 24 jam di lokasi kunjungan; serta (b) ekskursionis, yaitu pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24 jam di lokasi kunjungan, dan biasanya tidak menginap.

2. Masyarakat Setempat

Masyarakat lokal adalah pihak yang paling akan menerima dampak dari kegiatan wisata yang akan dikembangkan di daerahnya. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat setempat merupakan komponen permintaan yang juga penting untuk dipertimbangkan dalam rangka pengembangan suatu kegiatan wisata. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan wisata yang diselenggarakan tidak akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat lokal menjadi tersingkir oleh adanya industri pariwisata yang dikembangkan di daerahnya. Sebaliknya, industri pariwisata seharusnya menjadi peluang bagi pemberdayaan sumberdaya dan menjadi stimulant *multiplier effects* positif bagi perekonomian dan kemajuan masyarakat lokal.

2.3.5 Destinasi Wisata

Destinasi wisata merupakan suatu area geografi, dapat berupa daerah administrasi atau bentukan area geografi yang digunakan untuk memuaskan wisatawan. (A.V Seaton & M.M Bennett, 1996, p.350). Di dalam memasarkan destinasi terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai oleh pemasar, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan citra dari suatu daerah dengan harapan dapat mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas dari fasilitas dan infrastruktur di daerah tersebut yang tidak hanya berguna bagi keleluasaan para wisatawan namun juga berguna bagi masyarakat lokal di mana destinasi tersebut berada.

3. Memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat lokal terhadap daerahnya karena banyak wisatawan yang ingin datang dan melihat daerahnya tersebut.
4. Memberikan sebuah pemikiran baru dan pemasukan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas di lingkungan lokal suatu destinasi.
5. Mencoba untuk membuat destinasi agar dapat lebih diterima oleh wisatawan dengan membaca ekspektasi dari wisatawan dan juga melihat pada kebijakan dari pemerintah. (Sumber : Susan Homer and John Swarbroke, 1996



Tabel 2.1
Kajian Variabel Pendukung Pariwisata

Supply	No	Kajian Pendukung	Teori	Variabel Data	Bentuk Data	Metode Pengumpulan Data
	1	Daya Tarik Alamiah	Wahab, Usep Surahman(2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Topografi • Kondisi Geologi • Kondisi Jenis Tanah • Kondisi Klimatologi • Kondisi Rawan Bencana Alam • Kondisi Objek Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabel • Peta • Uraian 	Primer Sekunder
	2	Fasilitas Wisatawan	Wahab, Usep Surahman(2009), Hary, Soekdjido, Boud-bovy&lausen(1997), Warpani(2007), coper at al(1993)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Penginapan 2. Sarana Peribadatan Sebagai Pendukung Pariwisata 3. Sarana Kesehatan Sebagai Pendukung Pariwisata 4. Sarana Keamanan Sebagai Pendukung Pariwisata 5. Tourist information centre 6. Jalan Sebagai Pendukung Pariwisata 7. Air Bersih Sebagai Pendukung Pariwisata 8. persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabel • Peta • Uraian • Gambar 	Primer Sekunder
	3	Daya Tarik Wisata	- Oscar, 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya Tarik Wisata - Alam <ol style="list-style-type: none"> a. Pemandangan b. Pantai c. Danau 	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian • Gambar 	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder

				d. Sungai - Kearifan Lokal - Artefak (Bangunan kuno)		
	4	Atraksi Wisata		2. Atraksi Wisata - Wisata Budaya a. Festival Budaya b. Upacara Adat 3. Tarian dan Lagu Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian • Gambar 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekunder
	5	Promosi Wisata	- Warpani, 2007	1. Sistem Promosi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian • Tabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekunder • Primer
Demand		Demmand Pariwisata	Warpani (2007)	1. Karakteristik dan Pola Kunjungan Wisatawan. 2. Jaring Aspirasi Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung a. Aspirasi Wisatawan b. Aspirasi Masyarakat Sekitar Kawasan Pariwisata. c. Aspirasi Pelaku Pada Sektor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Tabel • Uraian • Gambar 	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder

Sumber : Hasil Analisis Tinjauan Teori, 2015

2.4 Sapta Pesona

Makna logo Sapta Pesona dilambangkan dengan Matahari yang bersinar sebanyak 7 buah yang terdiri atas unsur Kemanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan. Tujuan diselenggarakan program Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Negara kita. Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan. Kita harus menciptakan suasana indah dan mempesona, dimana saja dan kapan saja. Khususnya ditempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan dan pada waktu melayani wisatawan.

Dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan indah dalam hidupnya.

1. Aman

Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tenteram, tidak takut, terlindungi dan bebas dari :

- a. Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan dan lain sebagainya.
- b. Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya
- c. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan, untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan rekreasi atau olah raga.
- d. Gangguan oleh masyarakat, antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan tangan jail, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya.

Jadi, aman berarti tejamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan

2. Tertib

Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat, misalnya :

- a. Lalu lintas tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya.
- b. Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untuk mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan
- c. Bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi
- d. Pelayanan dilakukan secara baik dan tepat
- e. Informasi yang benar dan tidak membingungkan

3. Bersih

Bersih merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat seperti :Lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum, seperti di hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buangair kecil/besar dan lain sebagainya. Bersih dari sampah, kotoran, corat-coret dan lain sebagainya.

- a. Penggunaan dan penyajian alat perlengkapan yang bersih seperti sendok, piring, tempat tidur, alat olah raga dan lain sebagainya
- b. Pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap dan lain sebagainya
- c. Sajian makanan dan minuman bersih dan sehat

4. Sejuk

Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman dan tenteram. Kesejukan yang dikehendaki tidak saja harus berada di luar ruangan atau bangunan, akan tetapi juga di dalam ruangan, misalnya ruangan kerja/belajar, ruangan makan, ruangan tidur dan lain sebagainya. Untuk itu hendaklah kita semua :

- a. Turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat maupun pemerintah
- b. Berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, melakukan penanaman poho/tanaman rindang di sepanjang jalan di lingkungan masing-masing di halaman sekolah dan lain sebagainya

- c. Membentuk perkumpulan yang tujuannya memelihara kelestarian lingkungan.
- d. Menghiasi ruang belajar/kerja, ruang tamu, ruang tidur dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk.
- e. Memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman.

5. Indah

Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat.

Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib serta tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.

6. Ramah Tamah

Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Ramah tamah tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita ataupun tidak tegas dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikap. Ramah, merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.

7. Kenangan

Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain :

1. Akomodasi yang nyaman, bersih dan sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam bentuk dan gaya bangunan serta dekorasinya
2. Atraksi seni budaya daerah yang khas dan mempesona baik itu berupa seni tari, seni suara dan berbagai macam upacara
3. Makanan dan minuman khas daerah yang lezat, dengan penampilan dan penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupakan salah satu daya tarik yang kuat dan dapat dijadikan jati diri (identitas daerah).
4. Cenderamata yang mungil yang mencerminkan ciri-ciri khas daerah bermutu tinggi, mudah dibawa dan dengan harga yang terjangkau mempunyai arti tersendiri dan dijadikan bukti atau kenangan dari kunjungan seseorang ke suatu tempat/daerah/Negara.

Sapta Pesona dan tujuan pelaksanaannya begitu luas dan tidak untuk kepentingan pariwisata semata. Memasyarakatkan dan membudidayakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tujuan yang jauh lebih luas, yaitu untuk meningkatkan disiplin nasional dan jati diri bangsa yang juga akan meningkatkan citra baik bangsa dan Negara.

2.5 Pengertian Bencana Alam

Pengertian bencana atau disaster adalah *disaster is the impact of a natural or man-made hazards that negatively effect society or environment* yang artinya bencana adalah pengaruh alam atau ancaman yang dibuat manusia yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Adapun siklus penanganan bencana dapat diklasifikasikan menjadi dua tahapan, pra bencana dan paska kejadian bencana. Upaya paska bencana mencakup upaya tanggap darurat dan upaya rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, sandang pangan, hunian sementara , relokasi permukiman ke tempat yang lebih aman, pengembalian kemampuan social ekonomi masyarakat mendekati sebelum kejadian bencana dsb. Untuk skema tanggap darurat Dapat dilihat pada gambar

2.1



Gambar 2.1
Skema Tanggap Darurat

Ruang wilayah yang ada, konsistensi antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang menjadi syarat utama bagi terwujudnya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keserasian dan keselarasan antara budidaya dan lindung akan terwujud, jika suatu wilayah dikembangkan dengan memegang prinsip dan kaidah pengembangan wilayah.

Penataan kawasan bencana pada lingkup kabupaten dan kota deliniasinya seringkali dilakukan dengan input kawasan yang telah pernah mengalami bencana tersebut, namun penetapan kawasan rawan bencana secara prediktif dan antisipatif umumnya belum sepenuhnya dilakukan. Akibatnya kawasan-kawasan bencana menjadi terabaikan dan berakibat timbulnya ketidakserasian antara penggunaan fungsi tata ruang dengan kawasan rawan bencana di koridor wisata. Hal ini cukup membahayakan karena tidak hanya merusak infrastruktur yang sudah ada tetapi juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para wisatawan yang melewati jalur wisata ketika bencana tersebut muncul. Pemanfaatan ruang wilayah didasarkan kepada rencana tata ruang wilayah. Konsistensi antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang menjadi prasyarat terwujudnya keserasian dan keselarasan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Keserasian dan keselarasan antara kawasan budidaya dan lindung terwujud jika suatu wilayah dikembangkan dengan memegang prinsip dan kaidah pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah adalah suatu disiplin ilmu dan pendekatan berfikir didalam mewujudkan terciptanya pemanfaatan ruang yang

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan senantiasa memperhatikan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengembangan wilayah menekankan pentingnya keserasian antara pembangunan pada daerah hulu dan hilir, antara wilayah daratan dengan pesisir atau pulau, serta antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Dengan kata lain pengembangan koridor wisata ini menekankan adanya keserasian dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

2.5.1 Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

2.5.2 Mitigasi Bencana yang Efektif

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.

1. Penilaian bahaya (*hazard assessment*); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya;

2. Peringatan (*warning*); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.
3. Persiapan (*preparedness*). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

2.5.3 Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Perwujudan Masyarakat atau komunitas yang berdaya dalam menghadapi bencana dapat diwujudkan melalui Siklus Pengurangan Risiko Berbasis Masyarakat/Komunitas berikut:



Gambar 2.2
Siklus Pengurangan Risiko Berbasis Masyarakat/Komunitas

Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan sebelum/pra bencana dapat dilakukan melalui perkuatan unit/lembaga yang telah ada dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat bencana tidak mengenal wilayah administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang potensial di wilayahnya.

Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain:

1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana;
2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan;
3. Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik;

4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan;
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.

2.5.4 Sarana Mitigasi Benca Alam

Menurut kamus tata ruang, definisi saran adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, definisi mitigasi adalah untuk meminimalisasi dampak negatif bencana yang akan terjadi. Mitigasi juga merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas – aktivitas dan tindakan – tindakan perlindungan yang mungkin diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih kuat, sampai dengan yang prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya di dalam penggunaan lahan.

Dalam peraturan permendagri No. 27 Tahun 2007 tentang penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud meliputi:

I. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

1. Peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
2. posko bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dll,
3. Rute dan lokasi evakuasi pengungsi,
4. Prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana;
5. Dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
6. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;

7. Tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, persiapan *valbed* serta persiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
8. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan
11. Peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana;
12. Lokasi sementara bagi pengungsi.

II. Sarana dan Prasarana Khusus

Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;

1. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
2. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas untuk menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
3. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
4. *trauma centre* oleh pemerintah daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
5. alat transportasi daerah dalam penanggulangan bencana dan;
6. lokasi kuburan bagi massal korban yang meninggal

2.5.5 Jalur Penyelamatan dan Rute Penyelamatan

Jalan penyelamatan dan rute penyelamatan bertujuan untuk memudahkan warga masyarakat untuk melakukan proses evakuasi penyelamatan ke tempat yang lebih aman. Standar yang digunakan untuk lebar jalan penyelamatan adalah minimal 6 meter dengan kualitas jalan aspal kelas I, selain dari jalan penyelamatan maka lebar jalan direncanakan minimal 4 meter dengan kualitas aspal kelas III.



Gambar 2.3
Contoh Evakuasi Bencana Alam

2.6 Prinsip dan Ciri Dasar Pertimbangan Pengembangan Kegiatan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan (Ekowisata)

Menurut Crabtree, dkk 2002,5, wood 1996 dalam Wadojo 2002,4-5 dan wood 2002,28 prinsip dan ciri dasar pengembangan ekowisata harus memenuhi kriteria-kriteria dasar sebagai berikut:

1. Fisik

- Melakukan perencanaan kegiatan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri pariwisata, dengan melakukan penelitian terlebih dahulu agar pengembangan pariwisata berkontribusi terhadap pengembangan wilayah dan tidak melampaui daya dukung lingkungan.
- Melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan alami sekitarnya;
- Memiliki dampak minimal terhadap lingkungan alami selama masa konstruksi dan masa operasinya;
- Sesuai dengan konteks budaya dan fisik wilayah setempat, misalnya ditandai dengan arsitektur yang menyatu dengan bentuk, lansekap dan warna lingkungan setempat;
- Mengurangi tingkat konsumsi air dan menggunakan cara alternatif yang berkelanjutan untuk mendapat tambahan air;
- Memenuhi kebutuhan energi melalui penggunaan alat dan fasilitas berdesain pasif (desain yang tidak banyak mengubah lingkungan alami)

2. Ekonomi

- Memberikan kontribusi positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan;

- Mengakomodasi berbagai program penelitian dalam rangka kontribusi kegiatan ekowisata terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan wilayah setempat.
- Mengalokasikan pendapatan yang diperoleh untuk kegiatan konservasi wilayah alami dan manajemen wilayah lindung.
- Mempertahankan presentase pendapatan yang tinggi bagi pemerintah.

3. Sosial

- Menawarkan program yang berkualitas untuk memberikan pendidikan kepada wisatawan, tenaga kerja pariwisata dan masyarakat lokal, agar mereka menyadari pentingnya konservasi lingkungan alami dan budaya setempat serta memiliki apresiasi yang lebih tinggi terhadap alam dan budaya lokal tersebut;
- Mengupayakan kerjasama dengan komunitas lokal dalam pembangunan dan pengelolaan kegiatan wisatanya;
- Memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial masyarakat lokal secara berkelanjutan;
- Menghormati dan melindungi budaya lokal serta sensitif terhadap keberadaan dan pengembangan budaya tersebut.

2.7 Definisi Operasional

Pada Sub bab ini menjelaskan mengenai definisi operasional yang terdiri dari definisi judul pada studi, dan definisi lainnya yang bersangkutan dengan lingkup kajian

2.7.1 Definisi Judul

Definisi judul ini menjelaskan mengenai definisi setiap kata judul kajian studi terkait penjabaran variabel.

- **Strategi** adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. (*Bussinesdictionary*)
- **Pengembangan** adalah Proses, cara, perbuatan mengembangkan (*W.J.S. Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, jakarta 1976*)

- **Kawasan** adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. (*Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*)
- **Pariwisata** : Suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat lain yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam (*Yoety, 1982 : 35*).
- **Gunung Galunggung** adalah gunung berapi dengan ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut, terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan antara lain obyek wisata dan daya tarik wanawisata dengan areal seluas kurang lebih 120 Ha (Wikipedia bahasa Indonesia)
- **Kecamatan sukaratu Kabupaten Tasikmalaya** adalah yang memiliki luas 5.714,38 terdiri dari darat 990.861 Ha dan sawah 2.370 Ha. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padakembang
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tasikmalaya.

2.7.2 Definisi Lain

Beberapa istilah-istilah yang dikenal terkait tentang pariwisata

- **Pariwisata** adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu
- **Daya tarik wisata (DTW)** adalah potensi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata
- **Destinasi wisata** adalah suatu area geografi, dapat berupa daerah administrasi atau bentukan area geografi yang digunakan untuk memuaskan wisatawan.

- **Supply** adalah Komponen produk wisata yang dapat ditawarkan, meliputi aktivitas wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, serta prasarana dan sarana lingkungan
- **Demand** adalah komponen permintaan mencakup keinginan serta aspirasi wisatawan dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata
- **Prasarana pariwisata** adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan perjalanan dan kegiatan wisata.
- **Sarana pariwisata** merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.
- **Turisme** adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini
- **Image** adalah ide atau kepercayaan yang dimiliki wisatawan tentang produk dan pelayanan wisata yang mereka rasakan di daerah tujuan wisata

Beberapa istilah dalam undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dikenal dan beberapa istilah terkait tentang bencana.

- **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- **Bencana longsor** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa tanah longsor.
- **Kawasan rawan bencana alam** adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

- **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- **Kegiatan pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik, melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

- **Resiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- **Bantuan darurat bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- **Korban bencana** orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

